ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERPADU WIRA BHAKTI GORONTALO

JURNAL

YULIAN DANIAL WARTABONE
NIM. D01420006

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TERPADU WIRA BHAKTI GORONTALO

Yulian Danial Wartabone[1], Joice Machmud[2], Nur Eng Mokodompit[3]
[123]Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: yulian.wartabone@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze Financial Management in Integrated High School (SMA) Wira Bhakti Gorontalo. This research uses a qualitative research approach with a descriptive type of research. Data collection is done by observation, interviews and documentation. The results of the study concluded that the school financial management at SMA Wira Bhakti Gorontalo has been well managed. The results showed that in general, the budget planning process has been carried out well, involving various related parties such as foundations, school committees, and other stakeholders. However, there are still challenges in managing school finances, especially related to the compatibility between income and expenditure as well as budget supervision that is not optimal. The strategy to find sources of funds has involved various parties such as parents, the government, and banking institutions, but there are still problems such as arrears in tuition payments that affect school income. The use of school finances has been intended for various school operations and construction activities, but there needs to be an improvement in the supervision and evaluation of school finances, especially by involving independent auditors to ensure transparency and accountability. In terms of income and expenditure accountability, the school has provided written reports to the relevant parties, but still needs further improvement, especially in ensuring timely and accurate reports to all parties involved.

Keywords: *Finance, Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu WIra Bhakti Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah di SMA Wira Bhakti Gorontalo telah cukup terkelola dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, proses perencanaan anggaran telah dilakukan dengan baik, melibatkan berbagai pihak terkait seperti yayasan, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Namun, masih ada tantangan dalam mengelola keuangan sekolah, terutama terkait dengan kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan anggaran yang belum optimal. Strategi mencari sumber dana telah melibatkan berbagai pihak seperti orang tua siswa, pemerintah, dan lembaga perbankan, namun masih terdapat masalah seperti tunggakan pembayaran SPP yang mempengaruhi pemasukan sekolah. Penggunaan keuangan sekolah telah ditujukan untuk berbagai kegiatan operasional dan pembangunan sekolah, namun perlu dilakukan peningkatan dalam pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah, terutama dengan melibatkan auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran, sekolah telah memberikan laporan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait, namun masih perlu perbaikan lebih lanjut terutama dalam memastikan laporan yang tepat waktu dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Keuangan, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah memberi penjelasan dimana sekolah dikategorikan institusi dibawah naungan pemerintah yang diperlukan pengawasan untuk mengendalikan urusan internal dan pengawasan fungsional pada setiap daerah dan juga terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk memeriksa keuangan dalam mengendalikan tugas fungsional. Setiap sekolah memiliki kewajiban yaitu melakukan pengelolaan keuangan sesuai prinsip keuangan yang dikelola dengan tujuan agar sistem pengelolaan dalam hal ini keuangan menjadi efektif. Keuangan yang dikelola sekolah yang efektif dan optimal ditekankan supaya dilakukan sistem manajemen sekolah untuk mengatur keuangan dengan baik. Terdapat peraturan dari pemerintah nomor empat puluh delapan tahun dua ribu delapan tentang pendanaan pendidikan yang menggunakan beberapa prinsip seperti keadilan dan akuntabilitas umum dan juga efisiensi serta transparansi. Setiap sekolah dalam mengelola keuangan tidak terlepas dari keempat prinsip tersebut yang dimana selalu dimulai dari yang namanya perencanaan dan pengeluaran anggaran pendidikan dan juga realisasi penerimaan serta pengawasan sampai pada tahap pemeriksaan dan juga pertanggungjawaban.

Sesuai dengan keempat prinsip diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dan yang akan dijadikan indikator untuk pemecahan masalah dalam penelitian adalah menggunakan prinsip transparansi. Sekolah dalam mengelola keuangan terdapat beberapa hal yang harus dilaluinya yaitu melakukan perencanaan dan anggaran yang direalisasikan dan juga pertanggungjawaban, setiap sekolah masih jauh dari harapan berdasarkan prinsip yang seharusnya dilakukan sekolah dalam mengelola keuangan. Menurut Santoso (2018) salah satu unsur yang paling penting yang dilakukan instansi dan juga lembaga adalah pengelolaan keuangan. Dalam hal ini sesuai dengan pengertian di atas, keuangan yang terdapat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti Gorontalo sebagai tempat dilakukan penelitian ini karena mengingat keuangan sebagai suatu aspek dimana dari masing-masing kegiatan dengan harapan akan membantu lancarnya aktivitas belajar mengajar setiap siswa, infrastruktur dalam kegiatan supaya setiap siswa bisa berprestasi dalam proses belajar dan juga mengajar, dan ini diperlukan sistem yang dilakukan sekolah dalam mengelola keuangan yang benar dan tepat dan transparan dan juga dapat dilakukan akuntabilitas dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti Gorontalo.

Terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang oleh penulis jadikan sebagai kajian penelitian ytang relevan. Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh Helena Tuwa Sobu Sudi (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi SDN Merjosari 1 Malang). Dengan hasil penelitian bahwa sekolah terlebih dahulu diadakan rapat tahunan dengan tujuan merancang kegiatan sekolah dalam satu tahun kedepan dan dengan proses penyusunan RKAS. Setelah perencanaan, dilakukan sosialisasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana BOS. Realisasi pengelolaan dana BOS dengan jumlah murid 170, dimana semuanya mendapatkan BOS Rp. 900.000/siswa per tahap dan dalam satu tahun total penerimaan yaitu 3 kali serta berdasarkan realisasinya telah sesuai dengan prinsip-prinsip khususnya prinsip transparansi seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan prinsip pengelolaan keuangan selain prinsip transparansi.

Saputri Agustina. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal tahun pelajaran 2020/2021 juga dilakukan Perencanaan pengelolaan dana BOS sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Annysa Kecamatan Sunggal tahun pelajaran 2020/2021 diawali dengan proses penyusunan RKAS dan penyusunan RAB serta pelaksanaan penggunaan dan terakhir dilakukan pembukuan. Realisasi pengelolaan dana Bos sekolah juga telah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 pasal 59

Berdasarkan data awal yang ditemukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti Gorontalo, masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan sekolah berasal dari perencanaan, yaitu pertama ada kesenjangan antara jumlah penerimaan dengan jumlah kebutuhan sekolah. Kedua, tidak semua wali siswa yang berlatar belakang ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut membuat pihak sekolah tidak dapat sewenang-wenang dalam menentukan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau sekarang disebut Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), masalah pertama yaitu dana partisipatif atau SPP dari siswa yang menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan sekolah. Dana partisipatif yang berasal dari siswa tidak pernah terkumpul tepat waktu setiap bulannya sehingga menjadi piutang bagi sekolah. Keterlambatan dana partisipatif yang dibayarkan ke sekolah menjadi masalah serius bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti Gorontalo, karena dana kegiatan operasional sekolah banyak dibiayai oleh dana partisipatif masyarakat.

Masalah kedua, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di Dunia Usaha/Dunia Industri sekolah memerlukan kebutuhan *upgrading* peralatan, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan prasarana pembelajaran yang menuntut tersedianya sumber dana rutin tahunan yang tepat. Ketiga, Sekolah Menengah Atas (SMA) Wira Bhakti Gorontalo belum dapat memaksimalkan potensi yang ada di sekolah dalam mengembangkan sumber-sumber dana alternatif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah

Keuangan diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan dalam mengelola uang. Setiap individu dan organisasi akan memperoleh dan menghabiskan uang atau menginvestasikan uang. Keuangan berkaitan dengan proses, institusi, pasar, dan instrumen-instrumen yang terlibat dalam pengiriman uang antar individu, bisnis, dan pemerintah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelola sumber daya sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah (MBS), menjelaskan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawaban pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah (Dzulfikar, 2015). Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan,
2. orangtua atau peserta didik;
3. masyarakat.

Menurut undang-undang menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (UU No. 20/2003). Selanjutnya, menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat; sedangkan anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat (PP No. 48/2008). Pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen (Mestry, 2009).

Manajemen anggaran atau biaya sekolah merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah (Sutomo, 2011). Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawaban, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan (Bafadal, 2009). Van Horne dan Wachowicz mendefinisikan pengelolaan keuangan sekolah adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Pengelolaan keuangan sekolah menurut Bafadal dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan keuangan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Wijaya menyatakan bahwa fungsi keuangan merupakan kegiatan utama dalam pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab dalam suatu bidang dan mendefinisikan manajemen atau pengelolaan keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan tersebut.

Proses pengelolaan keuangan sekolah meliputi (Tampolon, 2015): 1. Perencanaan anggaran 2. Strategi mencari sumber dana sekolah 3. Penggunaan keuangan sekolah 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran 5. Pertanggungjawaban Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, diantaranya: 1. Penerimaan 2. Penggunaan 3. Pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
4. Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD (Bafadal, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menegah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Konsep Perencanaan

Perencanaan terjadi disemua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya (Daud, 2004). Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanankan guna mencapi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki unsur kegiatan mengindentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya (Somantri, 2014).

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dan untuk setiap komponen.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dirancang dalam RAPBS supaya mekanisme yang ditempuh secara benar, efektif, dan efisien. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksankan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab IX Pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran dana pendidikan dalam biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap (Dzulfikar, 2015).

Kemudian, juga dijelaskan bahwa biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi dalam satuan pendidikan berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh melalui

pengumpulan data dari latar alami (naturalistik), dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument utama atau instrument kunci. penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan makna di balik gejalah, dengan uraiaan deskriptif dan di bahas secara mendalam dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Data dan sumber data merupakan factor penentu keberhasilan suatu peneelitian. Tidak dapaat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipeercaya. Jenis dan sumbr data dalam penyusunan proposal skripsi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari beberapa informasi, yakni orang-orang yang mempunyai kapasitas memberikan informasi/data di desa tersebut sesuai dengan permintaan peneliti mlalui proses observasi dan wawancara.
2. Data Sekunder Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubunganya dengan materi proposal skripsi ini. Menurut Husen Umar (2004) bahwa: Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabl atau diagram.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Library research*
   Library research adalah data yang diperoleeh dari buku-buku yang penelitian ini jadikan referensi dalam penelitian ini.
2. *Field research*
   Field research yaitu data yang diperoleh dari peneliti di laangan dan menggunakan beberapa metode:
   a. Observasi (pengamatan)
      Teknik observasi merupakan metode penggumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti. Observasi adalah study yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dengan demikian, penulis dalam melakukan observasi dengan cara turun langsung ke lapangan serta mencatat semua hasil pengamatan dan penemuan yang berkaitan dengan proses penelitian. Metode Observasi memudahkan penulis dalam melaksanakan pengamatan di lapangan.
   b. *Interview* (wawancara)
      Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleeh keterangan dengan cara Tanya jawab sambl bertatap muka langsung . wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interview) dan yang diwawancarai (Moleong, 2000). Dari pengertian di atas, maka penulis dalam mendapatkan sebuah data melakukan wawancara dengan cara bertatap muka Tanya jawab langsung.
   c. Dokumentasi
      Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui dokumentasi atau gambar berupa foto tentang keadaan desa atau lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN

Lembaga pendidikan adalah sebuah entitas besar yang terdiri dari empat komponen yang saling terkait. Keempat komponen tersebut meliputi Staf Tata Usaha Administrasi, Staf Teknis Pendidikan yang mencakup Kepala Sekolah dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independen yang membantu dalam operasional pendidikan, serta siswa sebagai peserta

didik yang juga dapat dianggap sebagai konsumen dengan harapan pelayanan yang memadai. Hubungan yang sinergis di antara keempat komponen ini sangat penting karena keberlangsungan operasional sekolah bergantung pada hubungan "simbiosis mutualisme" di antara mereka. Karena kebutuhan akan pendidikan sangat tinggi, persiapan yang optimal harus diupayakan demi kebutuhan para siswa.

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan agar mampu mencetak anak didik yang berkualitas adalah manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Terdapat beragam sumber dana yang dimiliki oleh sebuah sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Ketika dana dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya mengalir masuk, sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur harus dipersiapkan. Pengelolaan keuangan pada dasarnya telah dilakukan dengan baik oleh sebagian besar sekolah. Namun, tingkat keseriusan dalam pelaksanaannya dapat beragam antara satu sekolah dengan yang lainnya. Keragaman ini tergantung pada ukuran sekolah, lokasinya, serta dukungan dari masyarakat dan sponsor lainnya. Pada sekolah biasa dengan dukungan masyarakat yang terbatas, pengelolaan keuangan nya cenderung sederhana. Sementara itu, pada sekolah dengan dukungan masyarakat yang besar, bahkan mungkin sangat besar, pengelolaan keuangannya akan menjadi lebih kompleks.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu Wira Bhakti Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam subbagian identifikasi masalah adalah: 1) Adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran, dan 2) Sekolah belum mampu mengembangkan potensi sumber pemasukan selain SPP. Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori dari Tampolon (2015) tentang Proses pengelolaan keuangan sekolah meliputi: 1. Perencanaan anggaran 2. Strategi mencari sumber dana sekolah 3. Penggunaan keuangan sekolah 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran 5. Pertanggungjawaban Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah.

Selanjutnya kelima indikator pengelolaan keuangan sekolah tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada para informan yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan reduksi serta tringulasi dalam melakukan analisis hasil penelitian yang mana pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran

Perencanaan anggaran pendidikan di sekolah adalah proses merencanakan penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Menurut Nanang Fattah (2004), perencanaan anggaran (penganggaran) merupakan tahap penyusunan anggaran. Perencanaan anggaran adalah penjelasan rinci mengenai rencana pemasukan dan pengeluaran suatu organisasi, sehingga setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Bastian, 2010).

Terkait dengan indikator perencanaan anggaran yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan di SMA Wira Bhakti Gorontalo, peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti adalah: "Bagaimana proses perencanaan keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah?" Menjawab pertanyaan

tersebut, informan yang berinisial MP selaku Kepala Sekolah SMA Wira Bhakti Gorontalo mengatakan bahwa proses perencanaan keuangan sekolah dilakukan pada akhir tahun pelajaran. Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan segala spek kebutuhan baik dalam bentuk program kegiatan yang akan dilakukan, kebutuhan akan aspek teknis dan pendukung lainnya.

Wawancara dengan informan DYH dan RN mengungkapkan bahwa proses perencanaan anggaran di sekolah dilakukan melalui proses pengumpulan kebutuhan dari setiap bagian di sekolah. Kebutuhan yang terkumpul kemudian dipertimbangkan dan disepakati, dan dari situ dilakukan penetapan program kegiatan yang menghasilkan RKS/RKAS. Setelah itu, dilakukan pendokumentasian administratif dan pelaporan berkala kepada yayasan. Informan lainnya, MK dan MA, menjelaskan bahwa perencanaan keuangan di SMA Wira Bhakti Gorontalo dilakukan melalui rapat kerja anggaran sekolah. Sementara itu, ALB, yang merupakan perwakilan dari Yayasan, menyatakan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan mengadakan rapat khusus dengan divisi keuangan. Divisi tersebut menyiapkan semua bahan yang akan dibahas dalam rapat, dengan memperhatikan besaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya serta mempertimbangkan pos-pos anggaran di masing-masing bidang.

Pertanyaan berikutnya terkait dengan perencanaan anggaran di SMA Wira Bhakti Gorontalo adalah: "Apakah dalam proses perencanaan keuangan sekolah telah melibatkan pihak-pihak yang berkompoten?" Menjawab pertanyaan tersebut, informan berinisial MP, yang juga Kepala Sekolah SMA Wira Bhakti Gorontalo, menyatakan bahwa penyusunan perencanaan anggaran sekolah telah melibatkan pihak-pihak terkait seperti Yayasan, Komite Sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, informan DYH, MK, dan MA menjelaskan bahwa tahapan perencanaan telah melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) telah melibatkan semua unit serta masing-masing Wakasek yang bertanggung jawab pada bidangnya, dan Kepala Tata Usaha (KTU) diminta untuk memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan yang termasuk dalam pembiayaan. Sementara itu, informan RN dan ALB juga menyatakan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan sekolah dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran. Namun, ada anggaran yang dalam penyusunannya melibatkan pihak eksternal, seperti Dinas Pendidikan, jika anggaran yang digunakan berasal dari anggaran pemerintah..

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMA Wira Bhakti Gorontalo telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan semua pihak terkait dalam rapat pembahasan mengenai kebutuhan pembiayaan untuk tahun ajaran berikutnya. Proses perencanaan keuangan dilakukan secara rutin setiap akhir tahun, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa pihak sekolah akan melibatkan pihak eksternal dalam pembahasan rencana anggaran jika anggaran tersebut bersumber dari pemerintah daerah atau pusat.

2. Strategi mencari sumber dana sekolah

Menurut Tjokroamidjojo (2000), strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin (output maksimum) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Ini melibatkan penentuan tujuan yang ingin dicapai atau dilakukan, serta cara, waktu, dan pelaku yang terlibat dalam pencapaian tersebut. Menurut Dessel (2008), strategi merupakan rencana

jangka panjang suatu organisasi yang berkaitan dengan cara organisasi tersebut menyelaraskan kekuatan dan kelemahan internalnya dengan peluang dan ancaman eksternal, dengan tujuan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Terkait dengan indikator ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan: "Strategi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mencari sumber pendanaan?" Menjawab pertanyaan tersebut, informan MP, yang juga Kepala Sekolah SMA Wira Bhakti Gorontalo, menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, termasuk yayasan, komite sekolah, para guru, karyawan, dan orang tua siswa dalam menyusun perencanaan keuangan. Perencanaan tersebut kemudian disepakati bersama dengan para orang tua sebagai kontributor utama dana sekolah.

Sementara itu, informan DYH, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, mengatakan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada siswa dan meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai kompetisi di tingkat lokal hingga nasional. Informan lainnya, MK, MA, dan RN, menyatakan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan mewajibkan orang tua siswa membayar biaya SPP dan Komite, sehingga meningkatkan pendapatan sekolah untuk kegiatan operasional. Sebagai sekolah swasta, sekolah ini bergantung pada pembiayaan mandiri, dan pemasukan dari SPP dan Komite sangat membantu dalam membiayai program dan kegiatan sekolah. Ketika ditanya kepada pihak yayasan, informan ALB menyatakan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru dan menegakkan disiplin dalam pembayaran SPP dan Komite secara tepat waktu oleh orang tua siswa.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti terkait dengan strategi mencari sumber dana sekolah adalah: "Selain SPP, dari mana saja sumber pendanaan lain di sekolah berasal?" Secara umum, para informan menyatakan bahwa selain SPP dan Komite yang diperoleh dari orang tua siswa, sekolah juga mendapatkan sumber pendanaan dari beberapa sumber lainnya. Ini termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, bantuan dari lembaga perbankan, serta donasi yang diperoleh melalui beasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa indikator strategi mencari sumber dana sekolah yang dilakukan oleh SMA Wira Bhakti Gorontalo telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari strategi pengenaan biaya SPP dan Komite sekolah kepada para orang tua siswa. Dengan adanya biaya ini, sekolah memperoleh sumber pemasukan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai aspek program dan kegiatan guna meningkatkan standar layanan dan prestasi siswa. Selain itu, pihak sekolah juga menerima bantuan pendanaan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk Dana Operasional Sekolah (BOS), bantuan dari lembaga perbankan, serta donasi yang diperoleh melalui beasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh para siswa. Dengan demikian, berbagai sumber dana ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung operasional sekolah dan pelaksanaan program-program pendidikan.

3. Penggunaan keuangan sekolah

Menurut Depdiknas (2000), manajemen keuangan adalah serangkaian tindakan pengelolaan keuangan yang mencakup pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat dijelaskan sebagai

serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pengeluaran dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dalam penelitian ini, indikator penggunaan keuangan sekolah lebih berfokus pada sejauh mana pihak sekolah menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Dalam rangka menguraikan indikator tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan para informan dengan pertanyaan: "Keuangan sekolah digunakan pada kegiatan apa saja?"

Menjawab pertanyaan tersebut, informan MP, yang juga Kepala Sekolah SMA Wira Bhakti Gorontalo, menyatakan bahwa keuangan sekolah digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang meliputi beberapa bidang kegiatan, seperti sarana dan prasarana, kurikulum, kehumasan, kesiswaan, dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah jika dana berasal dari sumber tersebut. Informan lainnya, secara kompak, menyatakan bahwa keuangan sekolah digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan, akomodasi kegiatan, dan penunjang lainnya. Selain itu, keuangan sekolah juga digunakan untuk biaya makan siswa yang berasrama, biaya gaji karyawan, serta kegiatan pembangunan.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti terkait dengan indikator penggunaan keuangan sekolah adalah: "Apakah selama ini keuangan sekolah telah sesuai antara pemasukan dan pengeluaran?" Menjawab pertanyaan tersebut, informan yang terdiri atas MP, MK, MA, RN, dan ALB menyatakan bahwa keuangan sekolah telah sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Mereka menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sekolah telah menggunakan atau merujuk pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, keuangan sekolah masih terjaga stabilitasnya dan masih mampu mendanai program-program yang tidak terencana sebelumnya dalam RKAS. Namun, informan DYH memberikan tanggapan yang berbeda. Dia menyatakan bahwa antara pemasukan dan pengeluaran belum sesuai. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh masih adanya tunggakan pembayaran SPP dari sejumlah siswa, yang menyebabkan sejumlah dana belum masuk ke kas sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait indikator penggunaan keuangan sekolah di SMA Wira Bhakti Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan tersebut belum berjalan dengan baik. Meskipun keuangan sekolah digunakan untuk operasional berbagai bidang kegiatan seperti penyediaan sarana dan prasarana, kurikulum, kesiswaan, kehumasan, serta kegiatan teknis lainnya termasuk biaya makan siswa berasrama dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan, namun penggunaannya belum seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya siswa yang menunggak pembayaran SPP. Hal ini menyebabkan pemasukan ke kas sekolah tidak optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan dana untuk kegiatan lainnya. Misalnya, kegiatan pembangunan yang sebagian dibiayai dari dana komite juga terpengaruh. Dengan demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah, serta untuk mengatasi masalah tunggakan pembayaran SPP guna memastikan pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah dapat seimbang dan mendukung kelancaran berbagai program dan kegiatan sekolah.

4. Pengawasan dan evaluasi anggaran

Pengawasan anggaran adalah tindakan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan anggaran juga berperan sebagai pedoman untuk mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan

anggaran sekolah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Evaluasi adalah proses yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja suatu kebijakan dengan cara melakukan pemeriksaan sistematis terhadap efektivitas program. Ini melibatkan penilaian terhadap kontribusi program terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dan juga menilai kebutuhan untuk meningkatkan, melanjutkan, atau memperluas program dengan memberikan rekomendasi yang sesuai.

Terkait dengan indikator pengawasan dan evaluasi anggaran di SMA Wira Bhakti Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan adalah: "Bagaimana proses pengawasan dan evaluasi anggaran keuangan sekolah?" Menurut informan MP, MK, MA, RN, dan ALB, proses pengawasan dan evaluasi keuangan di SMA Wira Bhakti Gorontalo terbagi menjadi dua. Untuk keuangan secara internal, yayasan dan pimpinan sekolah bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi, terutama terkait dengan penggunaan SPP dan Komite. Sedangkan untuk keuangan yang melibatkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak eksternal. Proses ini dilakukan secara berkala oleh yayasan dan pihak eksternal. Namun, informan DYH memberikan perspektif yang berbeda. Menurutnya, proses pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah, terutama pimpinan sekolah. Selain itu, yayasan cabang juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan setiap tahun. Namun, menurut informan DYH, audit independen diperlukan karena pemeriksaan atas pengelolaan keuangan sekolah saat ini hanya dilakukan secara internal dan belum dilakukan secara profesional..

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan indikator pengawasan dan evaluasi anggaran di SMA Wira Bhakti Gorontalo adalah: "Siapa yang melakukan proses pengawasan dan evaluasi anggaran sekolah?" Menjawab pertanyaan tersebut, semua informan dalam penelitian ini memiliki jawaban yang serupa. Mereka menyatakan bahwa pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak yayasan jika dana berasal dari sumber internal, dan oleh tim manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jika dana tersebut berasal dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait indikator pengawasan dan evaluasi anggaran di Sekolah SMA Wira Bhakti Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan dan evaluasi secara internal yang dilakukan oleh pihak yayasan dan pimpinan sekolah terkait dengan dana internal seperti SPP dan Komite sekolah. Sedangkan untuk dana eksternal yang diterima dari pemerintah, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim manajemen BOSP.

Namun, perlu dicatat bahwa menurut informan DYH, proses ini belum melibatkan auditor independen. Dengan demikian, proses pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah hanya dilakukan oleh pihak yayasan dan sekolah terkait dengan keuangan secara internal. Ini menandakan perlunya peningkatan dalam aspek pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah, termasuk keterlibatan auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana sekolah..

5. Pertanggungjawaban Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah

Menurut Rebore & Rebore yang dikutip dalam Narhizrah (2013), tanggung jawab utama manajer sekolah terhadap pemerintah, komite sekolah, masyarakat, dan guru-guru adalah

memberikan laporan tentang kondisi keuangan sekolah. Tanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah secara teratur ada pada manajer sekolah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari kontribusi orang tua siswa dan masyarakat harus dilakukan secara terperinci dan transparan, sesuai dengan sumber dana. Sedangkan untuk anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara berbeda. Laporan keuangan ini sangat penting, karena membantu pemerintah atau masyarakat yang memberikan dana untuk mengetahui penggunaan uang yang telah disumbangkan ke sekolah. Ini juga memungkinkan mereka untuk mengetahui apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut telah terlaksana atau dilaksanakan sesuai rencana, serta melihat hasil kegiatan tersebut dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa, yang merupakan tugas utama sekolah.

Terkait dengan indikator pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah di SMA Wira Bhakti Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan para informan dengan pertanyaan: "Sekolah dalam penggunaan anggaran bertanggungjawab kepada siapa saja?" Jawaban dari keseluruhan informan dalam penelitian ini seragam. Mereka menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas keuangan sekolah diberikan kepada yayasan jika berkaitan dengan keuangan internal. Sedangkan, jika berkaitan dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada pemerintah. Selain itu, pertanggungjawaban juga diberikan kepada orang tua siswa, yang diwakili oleh komite sekolah.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan indikator pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah adalah: "Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan selama ini?" Jawaban dari keseluruhan informan adalah bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan selama ini adalah dengan menyusun laporan secara tertulis kepada yayasan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah setiap bulan, serta di akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait dengan indikator pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah, dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah berjalan dengan baik di SMA Wira Bhakti Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah telah mempertanggungjawabkan dana masuk dan keluar dengan memberikan laporan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait. Secara khusus, pihak sekolah memberikan laporan kepada yayasan jika terkait dengan dana internal seperti SPP dan Komite. Sedangkan untuk dana bantuan yang berasal dari pemerintah, pihak sekolah memberikannya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pihak sekolah telah menjalankan proses pertanggungjawaban dengan baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah di SMA Wira Bhakti Gorontalo, beberapa indikator penting telah dievaluasi, termasuk perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa secara umum, proses perencanaan anggaran telah dilakukan

dengan baik, melibatkan berbagai pihak terkait seperti yayasan, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Namun, masih ada tantangan dalam mengelola keuangan sekolah, terutama terkait dengan kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan anggaran yang belum optimal. Strategi mencari sumber dana telah melibatkan berbagai pihak seperti orang tua siswa, pemerintah, dan lembaga perbankan, namun masih terdapat masalah seperti tunggakan pembayaran SPP yang memengaruhi pemasukan sekolah. Penggunaan keuangan sekolah telah ditujukan untuk berbagai kegiatan operasional dan pembangunan sekolah, namun perlu dilakukan peningkatan dalam pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah, terutama dengan melibatkan auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran, sekolah telah memberikan laporan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait, namun masih perlu perbaikan lebih lanjut terutama dalam memastikan laporan yang tepat waktu dan akurat kepada semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa SMA Wira Bhakti Gorontalo telah melakukan upaya yang signifikan dalam mengelola keuangan sekolah dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam beberapa aspek tertentu guna memastikan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih efektif dan efisien.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan sekolah di SMA Wira Bhakti Gorontalo:

1. Peningkatan Pengawasan Internal
   Mengimplementasikan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat, termasuk audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan sekolah.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran
   Melakukan pelatihan secara berkala kepada staf sekolah terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan anggaran, penggunaan dana secara efisien, dan pentingnya pengawasan yang baik.
3. Pengelolaan Tunggakan Pembayaran
   Mengembangkan strategi untuk mengurangi dan menangani tunggakan pembayaran SPP dengan lebih efektif, termasuk dengan meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, memberikan insentif bagi pembayaran tepat waktu, dan mempertimbangkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel.
4. Penyusunan Laporan Keuangan yang Lebih Tepat Waktu dan Akurat
   Memastikan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan akurat setiap bulan dan akhir tahun, serta memperjelas informasi yang disampaikan agar dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat.
5. Melibatkan Auditor Independen
   Mempertimbangkan untuk melibatkan auditor independen dalam proses pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.
6. Diversifikasi Sumber Pendanaan
   Mengidentifikasi dan mengeksplorasi potensi sumber pendanaan baru yang dapat membantu mengurangi ketergantungan sekolah pada dana SPP dan Komite, seperti melalui program donasi, sponsor, atau grant.
7. Penguatan Kerjasama dengan Pihak Terkait
   Memperkuat kerjasama dengan yayasan, pemerintah daerah, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan dan koordinasi yang

optimal dalam pengelolaan keuangan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Akdon. 2006. Strategic Management For Educational Management, (Bandung: Alfabeta, h. 208.

Bafadal, Ibrahim. 2009. Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori, dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 28.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Pendidikan, (Yogyakarta: Erlangga, h. 67.

Daud, Jaleluddin. 2004. Prosedur Perencanaan, Jurnal USU Repository Universitas Sumatera Utara, h. 1.

Dzulfikar, M. Abid.2015. Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMAN Se-Kabupaten Kendal, Semarang: Universitas Negeri Semarang, h. 9.

Fattah, Nanang. 2006. Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, h. 48.

Harahap, Sofyan Syafri, 2008. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 67.

Harsono, 2007. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,), h. 50.

Jwild, John. Subramanyam dan Robert F. Halsey, 2005. Financial Statement Analysis: Analisis Laporan Keuangan, Edisi 10, Jakarta: Salemba Emapat, h. 93.

Minarti, Sri. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, h. 225.

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. cet.XIII; Bandung: Remaja Rosda Karya

Mulyasa, E. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Implementasi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.13, h. 47.

Mulyono, 2009. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 163.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2. 16

Pratama Arief Widodo. 2012. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pendidikan, Jurnal Ilmiah, h. 8.

Risa Alkurniadan Aulia Anggraini, Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan (Studi pada sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta), h. 3.

Somantri, Manap. 2014. Perencanaan Pendidikan, (Bengkulu: PT Penerbit IPB Press, h. 1.

Sotomo. 2011. Manajemen Sekolah, Semarang: UPT Unnes Press, h. 11.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, Jakarat: Niaga Swadaya, h. 54

Tampolon, Manahan. 2015. Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, h. 233.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pnedidikan Nasional.

Usman, Husaini. 2011. Manajemen, Teori, Pratik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Kencana, h. 65.

Wulaningrum, Ratna. 2011. Partisipasi Pegawai dalam Penyusunan Anggran Sekolah-Studi Kasus Pada SMP Negeri 10 Samarinda", Jurnal Eksis, Vol 7, No. 2. Agustus.